



**ANALISIS PENGARUH APBD DAN PDRB TERHADAP  
PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI STUDI PENINGKATAN  
AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

**TESIS**

Untuk Memperoleh Gelar Magister Manajemen (MM)

Pada Program Pasca Sarjana

Program Studi Magister Manajemen

Universitas Jember

Oleh :

**REZA FAHREDDY**

NIM : 990820101199

Asal :	Hadiah	Klass
Terima :	24 MAR 2005	ST/3
No. ....		FAH
Pengkatalog :		a

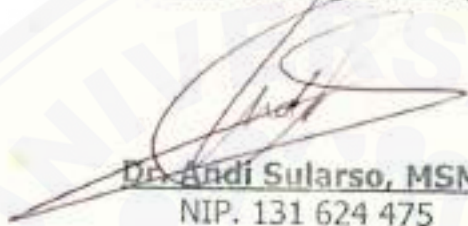
**UNIVERSITAS JEMBER PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN  
2004**

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

**Tesis Ini Telah Diterima**


Tanggal Oktober 2004

**Pembimbing Utama,**



Dr. Andi Sularso, MSM,  
NIP. 131 624 475

**Pembimbing**



Drs. Ec. Masharyono, MM  
NIP. 131 126 629

Mengetahui :

**Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Jember**



Prof. Ir. Made Sedhana  
NIP. 130 206 216

**Ketua Program Studi Manajemen**



Prof. Dr. H. Harijono, SU. Ec  
NIP. 130 350 765

## KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas karunia, hidayah serta inayah-Nya yang telah dilimpahkan, akhirnya penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Pembimbing Utama, Dr. R. Andi Sularso, MSM dan Pembimbing Anggota Drs. Ec. Mashariono, MM, yang telah berkenan meluangkan waktunya dengan ikhlas dan tekun dalam memberikan bimbingan dalam proses penelitian maupun penyusunan tesis ini.
2. Rektor Universitas Jember yang telah memberi kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister.
3. Direktur Program Pascasarjana dan Ketua Program Studi Magister Manajemen beserta staf yang telah memberikan membantu penulis selama mengikuti Program Magister.
4. Seluruh staf pengajar Program Magister Manajemen yang selalu dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan yang selama ini belum penulis miliki.
5. Istri anaku tersayang atas dukungan dan restunya.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan yang selalu diberikan, semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi mereka yang berkepentingan.

Jember, Oktober 2004

Penulis

**ANALISIS PENGARUH APBD DAN PDRB TERHADAP KINERJA  
PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI STUDI PENINGKATAN AKUNTABILITAS  
KINERJA PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

**Abstraksi**

Disadari bahwa lingkup kerja Pemerintah Kota saat ini sangat luas, yaitu terdiri aspek pembangunan (*developmental*), mengatur (*regulatory*) hingga lingkup kerja yang terkait dengan tugas pokoknya sebagai *public services* atau penyedia pelayanan layanan publik. Di orde reformasi ini kinerja atas peran Pemerintah Kota seperti itu dituntut untuk transparan dalam penyampaian laporannya. Karena itu perlu dilakukan penelitian yang mengulas kinerja dari peran Pemerintah Kota yang luas itu dengan segala keterbatasan secara transparan dan ilmiah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akuntabilitas kinerja pemerintah kota di bidang pelayanan publik, untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh APBD perkapita dan PDRB perkapita terhadap kinerja pelayanan publik serta untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh parsial dari APBD perkapita dari APBD perkapita dan PDRB perkapita terhadap kinerja pelayanan publik.

Berdasarkan kerangka konseptual diduga APBD dan PDRB mempengaruhi kinerja Pemkot Surabaya kaitannya dengan pelayanan publik. Pelayanan publik menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. Dengan menggunakan 7 (tujuh) indikator pelayanan publik kemudian dilakukan pengujian hubungan/pengaruh APBD dan PDRB terhadap kinerja Pemkot Surabaya.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan, bahwa APBD dan PDRB tidak berpengaruh secara signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap kinerja pelayanan publik.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	iv
RINGKASAN .....	v
ABSTRACT .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	7
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Pengertian Organisasi Pemerintah .....	8
2.1.2 Pengertian Kinerja .....	8
2.1.3 Pengertian Indikator Kinerja dan Alat Ukurnya .....	9

	2.1.4 Pengertian Akuntabilitas .....	10
	2.2 Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah .....	13
<b>BAB III</b>	<b>KERANGKA KONSEPTUAL</b>	
	3.1. Kerangka Konseptual .....	15
<b>BAB IV</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	4.1. Obyek Penelitian .....	16
	4.2. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	16
	4.3. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data .....	16
	4.4. Alat atau Instrumen Penelitian .....	17
	4.4.1 Pendekatan Kualitatif .....	17
	4.4.2 Alat Statistik .....	17
	4.5. Tehnik Analisis Data .....	17
<b>BAB V</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	5.1. Gambaran Umum .....	19
	5.1.1. Pemerintah Kota Surabaya .....	19
	5.1.2. Keuangan Pemerintah Kota Surabaya .....	21
	5.1.3. PDRB Kota Surabaya .....	28
	5.1.4. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Surabaya .....	33
	5.2. Deskripsi Hasil Penelitian .....	35
	5.3. Uji Hipotesis .....	36
<b>BAB VI</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN</b>	
	6.1 Simpulan .....	40
	6.2 Saran .....	40

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Struktur Anggaran Pendapatan APBD Tahun 1999-2000 .....	3
Tabel 1.2 Struktur Anggaran Belanja APBD Tahun 1999-2000 .....	3
Tabel 5.1 Struktur Penerimaan APBD 1999/2000 .....	23
Tabel 5.2 Struktur Belanja APBD 1999/2000 .....	24
Tabel 5.3 Rencana dan Realisasi APBD Kota Surabaya T.A 2000 .....	28
Tabel 5.4 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Tahun Dasar 1993) Kota Surabaya Tahun 2000-2001 .....	30
Tabel 5.3.2 Produk domestic Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Tahun 1993) Tahun 1996-2002 .....	27

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Konseptual.....	15
Gambar 5.1 Struktur Penyelenggaraan Organisasi Pemerintah Kota Surabaya Sesuai UU Nomor 22 Tahun 1999 .....	21
Gambar 5.2 Profil PAD Terhadap APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 1996 Sampai Dengan 2000 .....	23





DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Banyaknya Pelanggan Air Minum menurut Jenis Pelanggan Tahun 1997 – 2001
- Lampiran 2 Banyaknya Dokter Umum, Gigi, Spesialis di Kota Surabaya Tahun 1999 - 2001
- Lampiran 3 Banyaknya Sekolah menurut jenis dan Status sekolah Tahun 1997 - 2001
- Lmpiran 4 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Kondisi Jalan Beraspal dan Kelas Jalan Tahun 1997 - 2001
- Lampiran 5 Panjang Trayek Angkutan Umum Total Tahun 1999 - 2001
- Lampiran 6 Volume sampah yang diangkut Perbulan Tahun 1997 - 2001
- Lampiran 7 Panjang Saluran Air Kotor Tahun 1997-2001
- Lmpiran 8 Variabel Indikator Pelayanan

## .BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sejak terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998, maka kinerja Pemerintah Kota Surabaya dirasakan semakin perlu dibenahi, terlebih lagi dalam era otonomi daerah dan desentralisasi yang terjadi saat ini. Pengukuran kinerja banyak dipandang sebagai instrumen untuk mendorong peningkatan kinerja dan menjadi pijakan dalam menyusun strategi peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Disadari bahwa lingkup kerja Pemerintah Kota saat ini sangat luas, yaitu terdiri aspek pembangunan (*developmental*), mengatur (*regulatory*) hingga lingkup kerja yang terkait dengan tugas pokoknya sebagai *publik services* atau penyedia pelayanan layanan publik.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menuntut untuk dapat menyelenggarakan seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan yang merupakan kewenangan wajib, meliputi :

(a) Pekerjaan Umum; (b) Kesehatan; (c) Pendidikan dan kebudayaan; (d) Pertanian; (e) Perhubungan; (f) Industri dan Perdagangan; (g) Penanaman Modal; (h) Lingkungan Hidup; (i) Pertanahan; (j) Koperasi dan Tenaga Kerja

Namun demikian, dalam menyelenggarakan kesebelas kewenangan atau urusan lingkup kerja Pemerintah Kota Surabaya lebih difokuskan pada penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan tanggungjawab eksekutif dalam upaya melaksanakan tugasnya untuk mensejahterahkan masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Kota harus dapat memfasilitasi masyarakat supaya dapat bekerja sehingga memperoleh kualitas kehidupan yang layak

Kegiatan pelayanan publik yang dinilai penting untuk diukur terdiri atas atas 2 (dua) klasifikasi utama, yaitu pelayanan kebutuhan dasar serta pelayanan administrasi dan fasilitas umum. Masing-masing klasifikasi dirinci sebagai berikut:

1. Kebutuhan Dasar
  - a. Air Bersih
  - b. Kesehatan
  - c. Pendidikan
  - d. Transportasi
  - e. Persampahan
  - f. Sanitasi Lingkungan
  - g. Drainage
2. Pelayanan Umum : Administrasi dan Fasilitas Umum
  - a. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk
  - b. Penjaminan
  - c. Sertifikasi Tanah
  - d. Fasilitas Ekonomi
  - e. Penanggulangan Bencana
  - f. Pelayanan Sosial

Selain kedua klasifikasi pelayanan publik tersebut diatas, sebagai implikasi *good governance*, prasyarat pencapaian kinerja pelayanan publik yang baik juga menjadi hal yang tidak terpisahkan, jenis pelayanan publik dimaksud adalah :

1. Peningkatan kapasitas dan kualitas aparat Pemerintah Daerah;
2. Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta dokumen-dokumen publik lainnya, serta
3. Pemberian insentif bagi partisipasi sektor swasta dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Berdasarkan data hasil perhitungan keuangan APBD pada tahun anggaran 2000. Bahwa kinerja Pemerintah Kota Surabaya mengalami penurunan, seperti tercermin pada Tabel 1.1. Struktur Anggaran Pendapatan APBD Tahun Anggaran 1999 dan 2000. Dimana pada sumber penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari Pos Pendapatan Asli Daerah, mengalami pertumbuhan sebesar -5,46 %

Tabel 1.1 : Struktur Anggaran Pendapatan APBD TA. 1999 - 2000

PENDAPATAN DAERAH	1999		2000		Pertumbuhan (%)
	Realisasi (Rp.)	(%)	Realisasi (Rp.)	(%)	
Sisa Lebih Anggaran Tahun lalu	10.223.373	2,37	20.789.296	4,94	103,33
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	138.884.866	32,18	131.115.401	31,17	(- 5,46)
- Pajak Daerah	77.136.890	55,82	89.185.152	52,77	(- 10,31)
- Retribusi Daerah	48.387.581	33,46	48.041.068	36,64	3,54
- Bagian Laba BUMD	7.921.410	5,71	8.859.654	6,76	11,84
- Penerimaan Lain-lain	7.228.995	5,21	5.029.125	3,84	(- 30,43)
Dana Perimbangan:	210.387.274	48,82	221.784.385	52,72	5,42
- Bagi hasil Pajak	80.807.318	38,40	87.071.665	39,26	7,75
- Bagi hasil Bukan Pajak	4.049.827	1,92	3.125.258	1,41	(- 22,83)
- Dana Alokasi Umum (DAU)	93.910.508	44,64	124.080.782	55,94	32,11
- Dana Alokasi Khusus (DAK)	31.619.521	15,03	9.542.878	4,30	69,82
- Dana Darurat	-	-	-	-	-
Pinjaman Daerah	24.431.411	5,67	46.982.591	11,17	92,30
Penerimaan Lain-lain	47.249.569	10,96	9.660.796	2,30	(-79,55)
<b>Total Pendapatan</b>	<b>430.976.473</b>	<b>100</b>	<b>420.688.773</b>	<b>100</b>	<b>- 2,39</b>

Tabel 1.2. Struktur Anggaran Belanja APBD TA 1999 - 2000

BELANJA DAERAH	1999		2000		PERTUMBUHAN (%)
	Rp.	(%)	Rp.	(%)	
Belanja Rutin	260.013.774	64,85	225.332.655	68,56	(- 13,34)
1. Belanja Pegawai	99.611.248	38,31	93.358.190	37,94	6,28
2. Belanja Barang	40.054.201	15,40	39.152.809	15,24	(- 2,25)
3. Belanja Pemeliharaan	12.408.560	4,77	12.194.853	4,54	(- 1,72)
4. Belanja Perjalanan Dinas	658.642	0,25	805.620	0,30	22,32
5. Belanja Lain-lain	51.925.040	20,07	76.111.255	27,70	24,72
6. Angsuran Pinjaman & Bunga	29.729.042	11,43	20.782.760	7,51	(- 30,09)
7. Belanja tidak termasuk diatas	16.526.532	4,12	18.782.339	6,74	13,65
Belanja Pembangunan (Tidak atas 20 milyar pembangunannya)	102.926.334	25,67	125.804.371	33,44	22,23
<b>Total Belanja</b>	<b>400.946.199</b>	<b>100</b>	<b>381.137.027</b>	<b>100</b>	<b>(- 4,94)</b>

Sedangkan pada tabel 1.1 yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang dibiayai dengan APBD. Sebagai dampak dari euforia reformasi dimana menimbulkan berbagai permasalahan seperti kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) model baru yang sulit diberantas, masalah lemahnya penegakkan hukum (law enforcement), monopoli dalam kegiatan ekonomi; serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat yang memburuk. Meningkatnya jumlah pengangguran, dan bertambahnya jumlah penduduk miskin, serta menurunnya tingkat kesehatan masyarakat. Permasalahan tersebut dari satu sisi dapat dilihat memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah melalui kewenangan yang dilimpahkan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat daerahnya serta dapat terwujudnya Good Governance, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah, dimana Pemerintah Kota Surabaya sebagai penanggungjawab atas tersedianya pelayanan publik sesuai kondisi dan keoutuhan masyarakat di daerahnya, dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang melalui penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah yang dibiayai dengan menggunakan APBD dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Namun berdasarkan kenyataan yang ada di masyarakat pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kota semakin menurun meskipun anggaran untuk pembangunan dari tahun ke tahun bertambah. Belum dapatnya pemerintah kota Surabaya memainkan peranannya secara optimal, lebih disebabkan masih kuatnya peran Pemerintah Pusat dalam mewarnai keputusan kebijakan pelayanan publik yang dilaksanakan didaerah.

Hal ini berdampak pada Kinerja Pemerintah Kota Surabaya khususnya pada kinerja pelayanan publik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Disisi lain, pada era otonomi daerah dan desentralisasi. Dimana menuntut

adanya kemandirian daerah untuk dapat melaksanakan seluruh kewenangannya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat daerahnya. Serta mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dicapai melalui penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah, menggunakan Laporan Akuntabilitas kinerja pemerintahan. Kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya mempertanggungjawabkan seluruh penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerahnya sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat daerah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan yang menuntut adanya pertanggungjawaban kepada instansi Pemerintah di Daerah untuk dapat meningkatkan dan mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dicapai melalui penyelenggaraan kegiatan pelayanan pemerintahan dan pembangunan yang dibiayai dengan menggunakan APBD yang ditetapkan atas persetujuan DPRD.

Pemerintah Kota Surabaya (selaku Badan Eksekutif), sebagai penanggung jawab atas tersedianya pelayanan publik di Kota Surabaya. Dituntut untuk dapat melaksanakan kegiatan sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat

Dampak terjadinya perubahan politik pasca reformasi, menuntut perubahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Kebijaksanaan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah seringkali dianggap merugikan masyarakat daerah, terutama dalam penyediaan pelayanan publik masyarakat, seringkali dianggap hanya mengutamakan kepentingan strukturalnya atau instansi atasannya saja. Terutama dalam proses pengambilan keputusan, Pemerintah Daerah yang dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya hanya menjadikan masyarakat sebagai subyek dan dianggap tidak memperdulikan tuntutan perkembangan yang terjadi baik di masyarakat

maupun di lingkungan Daerahnya. Semakin menurunnya kesejahteraan serta tingkat kualitas kehidupan sosial masyarakat, sehingga berpotensi terhadap timbulnya kerawanan sosial dan permasalahan bagi Pemerintah Daerah terutama dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan.

Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya, menuntut Pemerintah Daerah untuk meningkatkan peranan serta kualitas dalam penyediaan pelayanan publik bagi masyarakatnya serta mempertimbangkan potensi dan berkembang Daerahnya.

Pemberlakuan Otonomi Daerah dan desentralisasi berdasarkan UU No. 22 dan UU No. 25 Tahun 1999, terjadi perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab serta dapat terwujudnya *Good Governance*.

Berdasarkan Inpres No. 7 Tahun 1999, merupakan perwujudan *Good Governance* melalui sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam hal ini, merupakan kewajiban bagi instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah untuk dapat mempertanggungjawabkan seluruh hasil yang telah dicapai baik keberhasilan maupun kegagalan dalam penyelenggaraan pemerintahannya secara periodik. Serta diberikan pula kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk menggali serta mengelola seluruh potensi sumber-sumber keuangan yang dimiliki, dimanfaatkan dalam rangka terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Pemerintah Kota Surabaya belum dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan Daerahnya, yaitu dengan menggunakan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Disebabkan oleh keterbatasan sumber pembiayaan yang dimiliki, yaitu pengelolaan keuangan Daerahnya atau APBD secara transparan dan akuntabel.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan gambaran latar belakang permasalahan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan, sebagai berikut :

- a. Apakah akuntabilitas kinerja pemerintah kota di bidang pelayanan publik telah memenuhi harapan ?
- b. Apakah APBD perkapita dan PDRB perkapita daerah kota secara simultan berpengaruh nyata terhadap kinerja pelayanan publik ?
- c. Apakah APBD perkapita dan PDRB perkapita secara parsial berpengaruh nyata terhadap kinerja pelayanan publik ?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengidentifikasi akuntabilitas kinerja pemerintah kota di bidang pelayanan publik.
- b. Untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh APBD perkapita dan PDRB perkapita terhadap kinerja pelayanan publik.
- c. Untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh parsial dari APBD perkapita dan APBD perkapita dan PDRB perkapita terhadap kinerja pelayanan publik.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi (masukan) untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah kota di bidang pelayanan publik.
- b. Hasil penelitian ini selain untuk memberikan konstribusi dalam pengembangan ilmu, diharapkan pula memberikan informasi bagi peneliti lain yang berminat dalam bidang yang sama.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Landasan Teori

#### 2.1.1. Pengertian Organisasi Pemerintah

Organisasi pemerintah adalah entitas yang bertujuan untuk memberikan pelayanan publik secara optimal kepada masyarakat.

Pemberlakuan UU Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah akan membawa perubahan dalam pola pengelolaan (manajemen) pemerintahan daerah. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 UU tersebut, kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam *seluruh bidang pemerintahan*, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan; peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain (seperti kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, sistem administrasi dan ekonomi negara, pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi strategis, konservasi dan standarisasi nasional).

#### 2.1.2. Pengertian Kinerja

Kinerja berasal dari kata *performance* yang artinya *manner of function*, artinya sejauh mana suatu organisasi ataupun individu berfungsi sesuai dengan posisi dan atau tugasnya. Dalam kaitannya dengan lingkup kerja Pemerintah Daerah, sedangkan kinerja Pemerintah Kota berarti bagaimana atau sejauh mana Pemerintah Kota menyelenggarakan urusan-urusan tersebut.

### 2.1.3. Pengertian Indikator Kinerja dan Alat Ukurnya

Selain bersifat umum, indikator kinerja pelayanan publik harus dapat dikumpulkan dan dipublikasikan secara reguler sehingga masyarakat /*stakeholder* mempunyai apresiasi terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Indikator yang disusun diharapkan mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Jelas dan mudah dipahami
2. Berdiri sendiri dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan salah satu golongan,
3. Dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah
4. Dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja secara komprehensif dan berlaku umum,
5. Mempermudah masyarakat untuk melakukan pemantauan dan kontrol dalam rangka memicu pemerintah daerah untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya,
6. Mendasarkan pada data-data yang mudah dikumpulkan, tidak mahal, dan memanfaatkan seoptimal mungkin data-data sekunder yang telah ada, serta
7. Disepakati oleh mayoritas *stakeholders*

Indikator pelayanan yang disepakati dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kriteria utama, yaitu :

#### a. Aksesibilitas Pelayanan Publik

Adalah cakupan atau luas jangkauan pelayanan baik terhadap jumlah penduduk sebagai konsumen layanan publik maupun terhadap luas wilayah untuk melihat tingkat pemerataan distribusi pelayanan itu sendiri

Indikator-indikator yang termasuk kriteria ini merepresentasikan sejauh mana masyarakat telah memperoleh kesebelas pelayanan yang disepakati dan/atau memperoleh informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan pelayanan publik tersebut. Indikator-indikator yang dimaksud antara lain :

1. Rasio jumlah pengguna air bersih terhadap jumlah penduduk
2. Rasio jumlah dokter ahli/spesialis terhadap jumlah penduduk
3. Rasio jumlah sekolah terhadap jumlah penduduk
4. Rasio panjang jalan total terhadap luas wilayah
5. Rasio panjang trayek angkutan umum total terhadap luas wilayah
6. Rasio volume sampah yang diangkut per/hari terhadap jumlah penduduk total
7. Panjang saluran air kotor per jumlah penduduk

**b. Kualitas Pelayanan Publik**

Adalah menunjukkan profesionalisme Pemerintah Kota dalam melayani masyarakat. Pada dasarnya indikator ini mencakup kecepatan pelayanan, tingkat jangkauan biaya dan kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan yang bersangkutan

Indikator-indikator yang termasuk kriteria ini merepresentasikan upaya Pemerintah Daerah dalam memperbaiki kualitas proses penyelenggaraan pelayanan publik sebagai prasyarat pencapaian kinerja pelayanan yang lebih baik. Indikator-indikator yang berlaku secara umum untuk kesebelas jenis pelayanan yang disepakati tersebut, antara lain :

1. Respon terhadap keluhan masyarakat mengenai pelayanan publik yaitu jarak waktu antara keluhan yang disampaikan hingga ditanggapi.
2. Komitmen Pemerintah Daerah terhadap perbaikan kinerja pelayanan publik yang diukur dari seberapa besar pemerintah mengakomodasi kepentingan publik pada program-program APBD.

### 2.1.3 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi instansi atau orang atau badan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pemberi mandat. Akuntabilitas publik (*public accountability*) dewasa ini menjadi kajian dan fokus bahasan yang marak, terutama setelah berhasilnya gerakan

proreformasi yang menuntut adanya keterbukaan (*transparency*) manajemen sektor pemerintahan di Indonesia. Selain keterbukaan, salah satu hasil dari gerakan reformasi tersebut adalah akan segera diterapkannya kebijakan otonomi daerah menyusul dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Kedua hasil dari proses reformasi tersebut (keterbukaan dan otonomi), nampaknya akan semakin menempatkan akuntansi pemerintahan pada posisi yang penting, yakni sebagai penyedia informasi untuk tujuan pertanggungjawaban (*stewardship and accountability*), manajerial dan pengawasan/pengendalian manajemen pemerintahan daerah. Jadi, akuntabilitas publik tidak dapat dilepaskan dengan peran akuntansi pemerintahan dalam menyongsong otonomisasi daerah.

Akuntabilitas (*accountability*) secara harfiah dapat diartikan sebagai "pertanggungjawaban". Namun penerjemahan secara sederhana ini dapat mengaburkan arti dari kata *accountability* itu sendiri bila dikaitkan dengan pengertian akuntansi dan manajemen. *Governmental Accounting Standard Board (GASB)* mendefinisikan istilah *accountability* sebagai *the requirement for government to answer to the citizenry – to justify the raising of public resources and the purposes for which they are used*.

Suatu entitas (organisasi) yang *accountable* adalah entitas yang mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil selama beroperasinya entitas tersebut, memungkinkan pihak luar mereview informasi tersebut, serta bila dibutuhkan harus ada kesediaan untuk mengambil tindakan korektif. Dengan demikian penggunaan istilah akuntabilitas publik mengandung makna yang jelas bahwa hasil-hasil operasi termasuk didalamnya keputusan dan kebijakan yang diambil/dianut oleh suatu entitas harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan

kepada publik (masyarakat) dan masyarakat harus pada posisi untuk mendapat akses tersebut.

Konsep akuntabilitas tersebut dapat dirinci dalam lima tingkatan akuntabilitas, yaitu: (1) *accountability for probity and legality*, (2) *process accountability*, (3) *performance accountability*, (4) *program accountability*, and (5) *policy accountability* (Stewart, 1991).

*Accountability for probity* berkaitan dengan penghindaran terhadap kejahatan jabatan (*malfeasance*) khususnya untuk meyakinkan bahwa dana telah digunakan dengan benar dan dengan cara yang benar. Sedangkan *Accountability for legality* menekankan bahwa kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang tidak melampaui batas.

*Process accountability* berkaitan dengan apakah terdapat prosedur-prosedur yang memadai yang diterapkan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas tertentu, serta usaha untuk meyakinkan apakah aktivitas-aktivitas tertentu dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. *Performance*, *program* dan *policy accountability* berturut-turut menekankan pada kinerja, program dan kebijakan suatu entitas yang disampaikan kepada publik.

Karena akuntabilitas juga menyangkut fungsi pengawasan, maka informasi yang disajikan kepada publik tersebut harus dimungkinkan untuk dapat diaudit oleh aparat pengawasan fungsional. Dalam kaitan ini akuntansi pemerintahan sebagai penyedia informasi (terutama yang bersifat keuangan) dari aktivitas penggunaan *resources* oleh entitas pemerintah (sektor publik) memegang peranan yang sangat signifikan. Karena tujuan akuntansi (pelaporan keuangan) seringkali diturunkan dari tujuan entitas, maka tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat (publik) merupakan landasan pelaksanaan akuntansi pemerintahan (*nonprofit organization*).

## 2.2. Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah

Untuk kebutuhan pembiayaan pembangunan, daerah dapat memanfaatkan sumber pendapatan daerah yang terdiri dari: (1) pendapatan asli daerah (pajak dan retribusi daerah, hasil BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain); (2) dana perimbangan; (3) pinjaman daerah (baik dari sumber dalam negeri maupun sumber luar negeri) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana perimbangan yang dimaksudkan adalah (a) bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumberdaya alam, (b) dana alokasi umum, dan (c) dana alokasi khusus.

Menurut UU Nomor 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dana alokasi umum ditentukan minimum 25% dari penerimaan dalam negeri dalam APBN. Dari jumlah ini, 10% akan diberikan untuk propinsi dan 90% diberikan kepada kabupaten/kodya. Perhitungan dana alokasi umum didasarkan pada bobot daerah masing-masing yang didasarkan pada bobot daerah masing-masing yang didasarkan pada: (a) kebutuhan wilayah otonomi daerah yang dicerminkan dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografi, dan tingkat pendapatan masyarakat dengan memperhatikan kelompok masyarakat miskin, (b) potensi ekonomi daerah, antara lain dicerminkan oleh potensi penerimaan daerah seperti potensi industri, potensi sumberdaya alam, potensi sumberdaya manusia, dan produk domestik regional bruto (PDRB). Sedangkan dana alokasi khusus akan dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.

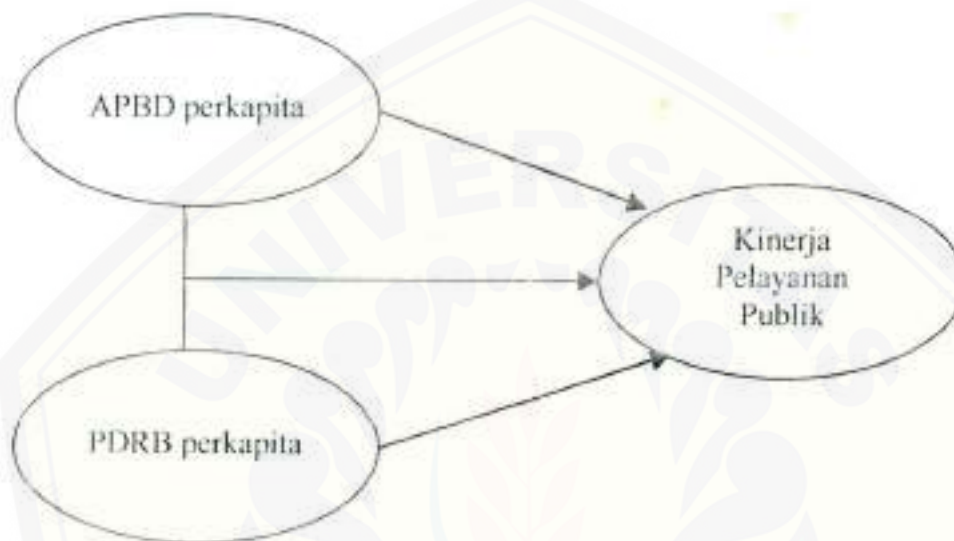
Perimbangan Keuangan adalah pembagian alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat yang diberikan kepada Daerah, besarnya jumlah dana perimbangan tersebut ditentukan berdasarkan jumlah penerimaan dalam negeri APBN, terdiri atas:

- a. Bagi Hasil Pajak,
- b. Bagi Hasil Bukan Pajak,
- c. Dana Alokasi Umum
- d. Dana Alokasi Khusus



•BAB III  
KERANGKA KONSEPTUAL

3.1. Kerangka Konseptual



Gambar 3.1: Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas maka dapat disusun kerangka konseptual seperti terlihat pada gambar 3.1, dimana : APBD dan PDRB perkapita berfungsi sebagai variabel independent atau sebagai faktor yang mempengaruhi dan Kinerja pelayanan Publik (tujuh indikator) berfungsi sebagai variabel dependent atau sebagai faktor yang dipengaruhi.



## BAB IV METODE PENELITIAN

### 4.1 Obyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu untuk mengetahui sejauh mana upaya Pemerintah Kota dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja, yaitu dengan menggunakan metode pengukuran kinerja.

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Surabaya, sebagai penanggungjawab pemerintahan dan pembangunan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan

### 4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode survey, maka lokasi penelitian adalah di kota Surabaya sesuai dengan judul serta keberadaan domisili Peneliti saat ini. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian  $\pm 1$  (satu) tahun atau 12 bulan, yaitu sejak digunakannya Undang-undang Otonomi Daerah (UU 22 Tahun 1999 dan UU 25 Tahun 1999), sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah oleh Pemerintah Kota Surabaya.

### 4.3 Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini dapat dibedakan dan dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. *Data Primer*, adalah data atau informasi yang diperoleh melalui observasi atau berdasarkan hasil pengamatan langsung pada lingkungan organisasi Pemerintah Kota Surabaya.
- b. *Data Sekunder*, adalah data atau informasi yang diperoleh melalui hasil laporan keuangan APBD kota Surabaya, seminar tentang obligasi daerah,

journal pembangunan daerah, surat kabar, dan lain-lain terkait pada penelitian ini.

#### 4.4 Alat atau Instrumen Penelitian

Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua) pendekatan, yaitu :

- 4.4.1 Pendekatan kuantitatif untuk mengukur kinerja Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2001,
- 4.4.2 Alat statistik yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan Statistik SPSS.

#### 4.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis Data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

- 4.5.1 Untuk menguji hipotesa perlu digunakan analisis rata-rata kinerja unsur pelayanan publik uji statistik *t data ujung* dengan tingkat signifikansi 5% notasi uji rata-rata kinerja adalah sbb :

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$$

- 4.5.2 Untuk menerapkan kerangka konseptual menggunakan teknik regresi linear berganda dengan model sbb :

$$Y_i = b_0 + b_1 \cdot X_1 + b_2 \cdot X_2$$

Dimana variabel dependennya adalah

Y = Indikator Kinerja Pelayanan Publik

X<sub>1</sub> = PDRB

X<sub>2</sub> = APBD

b = koefisien korelasi

$$H_0 = \bar{X} - \mu = 0$$

$$H_1 = \bar{X} - \mu > 0$$

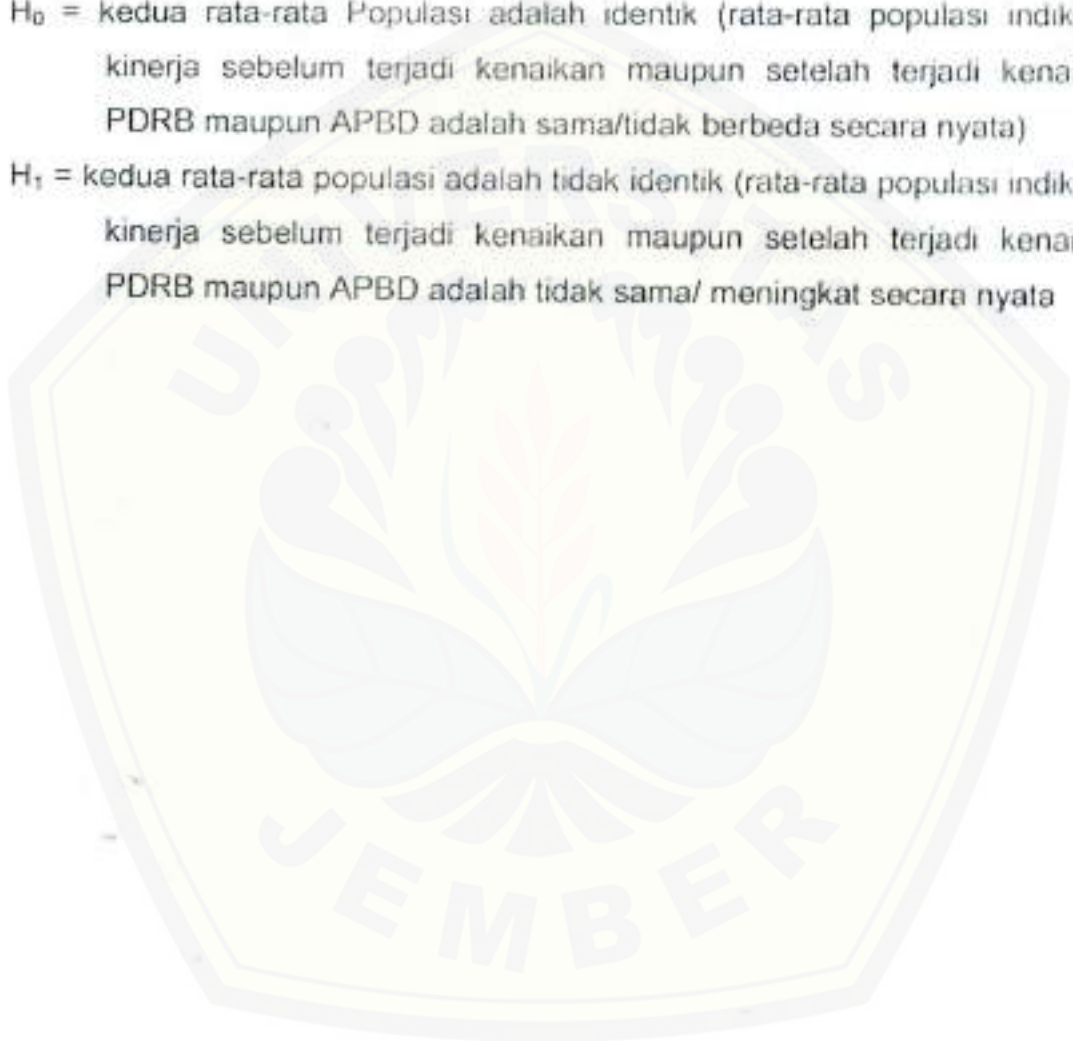
Dimana :

$H_0$  diterima jika Statistik hitung (angka t output) > Statistik Tabel (tabel t)

$H_0$  ditolak jika Statistik hitung (angka t output) < Statistik Tabel (tabel t)

$H_0$  = kedua rata-rata Populasi adalah identik (rata-rata populasi indikator kinerja sebelum terjadi kenaikan maupun setelah terjadi kenaikan PDRB maupun APBD adalah sama/tidak berbeda secara nyata)

$H_1$  = kedua rata-rata populasi adalah tidak identik (rata-rata populasi indikator kinerja sebelum terjadi kenaikan maupun setelah terjadi kenaikan PDRB maupun APBD adalah tidak sama/ meningkat secara nyata)



## BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Simpulan

Berdasarkan atas hasil penelitian serta pembahasan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Pemerintah Kota Surabaya belum berjalan sesuai harapan. Pada bidang pelayanan publik, akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan belum memenuhi harapan. ( Karena  $H_0$  ditolak)
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya secara simultan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Pemerintah Kota pada bidang pelayanan publik yang diukur melalui 7 (tujuh) indikator pelayanan publik.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Pemerintah Kota pada bidang pelayanan publik yang diukur melalui 7 (tujuh) indikator pelayanan publik.

### 6.2 Saran

Pemerintah kota Surabaya hendaknya perlu membenahi kinerja pelayanan publik mereka yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Surabaya.

Perlu dicari indikator yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja pelayanan publik karena APBD dan PDRB tidak memiliki pengaruh yang signifikan baik secara parsial maupun simultan.

Perlu dicoba suatu program atau item dalam pengeluaran pemerintah kota yang dapat digunakan sebagai indikator dan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kinerja pelayanan publik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, Dearden and Bedford, *Management of Control System*, 6<sup>th</sup> Edition, Richard D. Irwin Inc, 1989.
- Akuntabilitas dan Good Governance Suatu Pengantar, Tim Asistensi Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 1999
- Asian Development Bank, 1999, *Governance : Sound Development Management*, Archon, Fung & Erik Olin Wright, (2003), *Deepening Democracy : Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance*, *The Real Utopias Project IV*, London : Verso.
- Asian Development Bank, "Public Administration in the 21-st Century" (artikel di Internet).
- Bintoro Tjokroamidjojo, 2000, *Good Governance, (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*, Jurnal Manajemen Pembangunan No.30 Tahun IX, Mei 2000.
- Budiardjo Miriam, 2000, *Menggapai Kedaulatan untuk Rakyat*, Bandung : Mizan.
- Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Nasional & Departemen Dalam Negeri, 2002
- Buletin Informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2000
- Catanese, Anthony James, 1984, *The Politics of Planning & Development*, *Sage Library of Social Research, Volume 156*. Beverly Hills : Sage Publications Development Assistant Committee, 1997, *Evaluation of Programs Promoting Participatory Development & Good Governance*.
- Center for Financial Engineering in Development, Washington, D.C, 1993, *Bond Seminar "Train-the Trainer Manual of Readings"*, Indonesian Financial Markets Project Ministry of Finance.
- Fabozzi, Frank J. and Fabozzi, T. Dessa, 1989, *Bond Markets Analysis and Strategies*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.

- Ganie-Rochman, Meuthia, 2000, artikel "Good Governance : Prinsip, Komponen dan Penerapannya", dalam *HAM : Penyelenggaraan Negara Yang Baik dan Masyarakat Warga*, Jakarta : KOMNAS HAM.
- Garcia-Zamor, Jean-Claude, 1985, *Public Participation in Development Planning and Management : Cases from Africa and Asia*, London : Westview Press.
- Hill, Michael (1997), *The Policy Process*, London : Prentice Hall/Harvester Wheatsheaf.
- Hill, Michael & Peter Hupe, 2002, *Implementing Public Policy : Governance in Theory and in Practice*, London : Sage Publications, 2000
- J.B. Gharney, 1987, *Crisis, Accountability and Development in the Third World*, London
- Jurnal Pembangunan Daerah, "Aktualisasi Otonomi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, Ditjen Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri, 2000
- Lembaga Administrasi Negara 1999, *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Lembaga Administrasi Negara RI, Jakarta
- Loina Lalolo Krina P, 2003. *Indikator dan Alat ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, & Partispasi*, Sekretariat good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta
- Lutrin, Carl E. dan Allen K. Settle, 1985, *American Public Administration : Concepts & Cases, USA : Prentice-Hall Inc.* Minogue, Martin, artikel "The Management of Public Change : from 'Old Public Administration' to 'New Public Management'" dalam "Law & Governance" Issue 1, British Council Briefing, 1985
- MAB-MIAC Report on "Accountability in the Commonwealth Public Service: an Exposure Draft", No. 5 June 1991, Australia Government Publishing Service, Canberra.
- Moh.Nasir, Ph.D, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Peters, B.Guy, 2000, *The Politics of Bureaucracy*, London : Routledge.
- Schmidt, Gregory D (1989), *Donors and Decentralization in Developing Countries : Insights from AID Experience in Peru*, London : Westview Press.

Price Waterhouse, 1983. *Enhancing Government Accountability*,

Shafritz, Jay M. & E.W. Russell, 1997, *Introducing Public Administration, USA*  
: Longman). 1997

Sutherland, John W, 1978, *Management Handbook for Public Administrators*,  
*New York : Van Nostrand Reinhold Company Tjokroamidjojo, Bintoro*,  
(2001), Reformasi Administrasi Publik, Jakarta :

Surabaya dalam Angka, Badan Perencana Pembangunan Kota Surabaya  
dan Badan Pusat Statistik Kota Surabaya

....., 2000. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 22  
Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999)*, Bagian Organisasi  
Pemerintah Kota Surabaya

....., 1999. *Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang  
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*,  
Jakarta





Banyaknya Pelanggan Air Minum menurut Jenis Pelanggan  
Tahun 1997 - 2001

Tahun	Rumah Tangga	Niaga	Industri	Sosial	Instansi Pemerintah	Total
1997	199.030	16.623	789	5.583	931	222.956
1998	213.254	17.261	759	5.874	937	238.085
1999	232.010	16.898	750	6.038	937	256.633
2000	248.491	17.825	808	6.003	948	274.075
2001	265.104	19.083	833	6.205	944	293.169

Banyaknya penduduk menurut jenis kelamin hasil regresi

Jumlah Penduduk	
1997	2.355.496
1998	2.373.282
1999	2.405.946
2000	2.444.976
2001	2.568.352
rata-rata	2.429.808

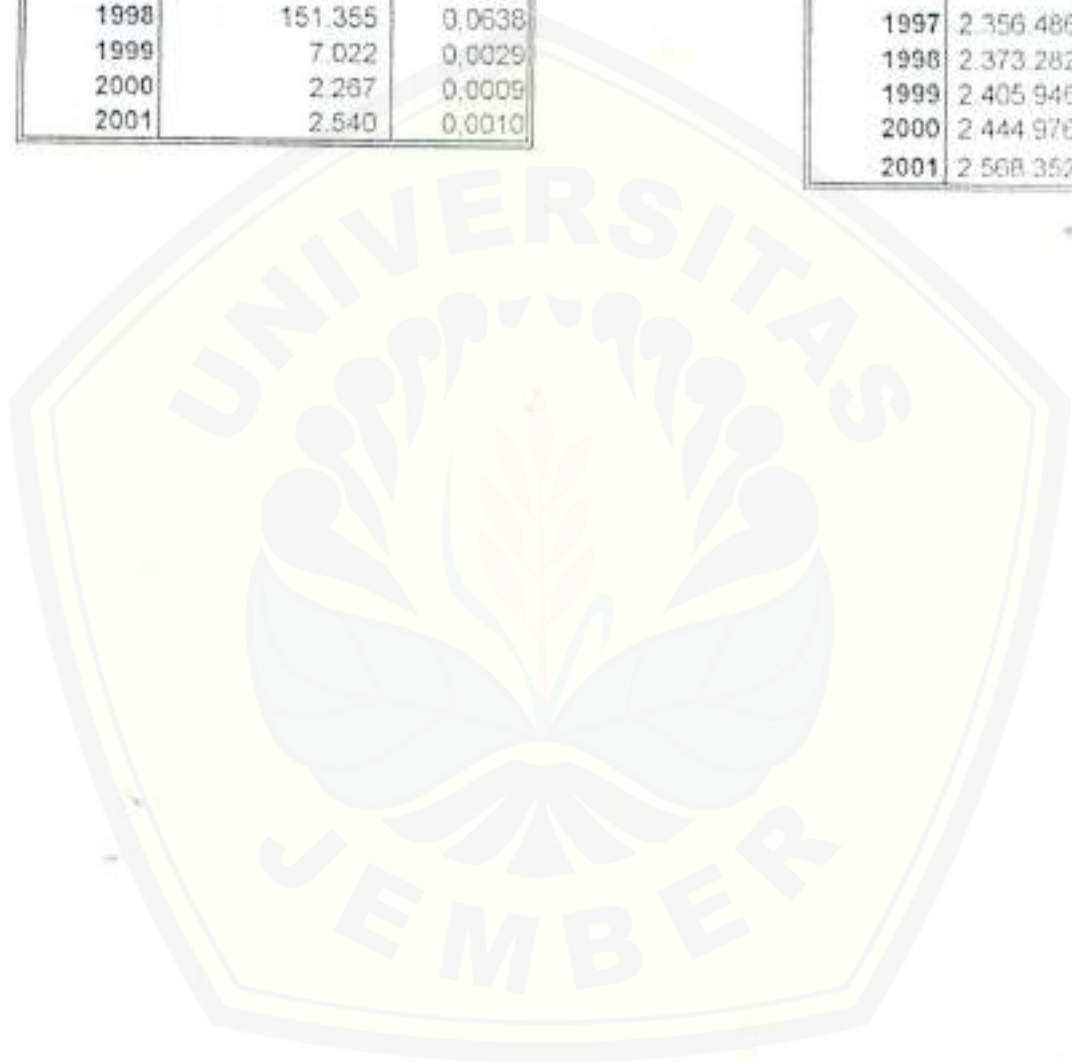
Rasio jumlah pengguna air bersih terhadap jumlah penduduk

Tahun	Rasio
1997	9,46
1998	10,03
1999	10,67
2000	11,21
2001	11,41
rata-rata	10,55

Rasio Panjang Saluran Air  
Tahun 1997-2001

Tahun	Panjang Saluran	Rasio
1997	13.466	0,0057
1998	151.355	0,0638
1999	7.022	0,0029
2000	2.267	0,0009
2001	2.540	0,0010

Jumlah Penduduk	
1997	2.356.486
1998	2.373.282
1999	2.405.946
2000	2.444.976
2001	2.568.352



Banyaknya Dokter Umum, Gigi, Spesialis di Kota Surabaya  
Tahun 1999 - 2001

Tahun	Dokter Umum	Dokter Gigi	Dokter Spesialis	Total
1997	1009	673	509	2191
1998	1097	701	530	2328
1999	1267	790	580	2643
2000	1267	796	580	2643
2001	1334	872	559	2765

Tahun	Rasio
1997	0.09
1998	0.10
1999	0.11
2000	0.11
2001	0.11
<i>rata-rata</i>	<b>0.10</b>

Jumlah Penduduk	
1997	2.356.485
1998	2.373.262
1999	2.405.946
2000	2.444.976
2001	2.558.352
<i>rata-rata</i>	<b>2.429.608</b>



Banyaknya Sekolah menurut jenis dan Status sekolah  
Tahun 1997 - 2001

Jenis dan Status	Tahun				
	1997	1998	1999	2000	2001
Sekolah TK	1045	1048	1070	1070	1070
Sekolah SD	1139	1112	1113	1168	1071
SLTP	345	343	340	337	343
SLTA	264	263	265	277	265
<b>Total</b>	<b>2794</b>	<b>2766</b>	<b>2789</b>	<b>2852</b>	<b>2750</b>

Tahun	Rasio
1997	0,12
1998	0,12
1999	0,12
2000	0,12
2001	0,11
<b>rata-rata</b>	<b>0,11</b>

Banyaknya penduduk menurut jenis kelamin dan registrasi tahun 199

Jumlah Penduduk	
1997	2.355.485
1998	2.373.282
1999	2.405.845
2000	2.444.976
2001	2.559.352
<b>rata-rata</b>	<b>2.429.808</b>

Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan,  
Kondisi Jalan Beraspal dan Kelas Jalan Tahun 1997 - 2001

Luas wilayah Surabaya  
Kurang lebih 326,35 km

Berdasarkan	Tahun				
	1997	1998	1999	2000	2001
Jenis Permukaan	2035,95	2035,95	2035,95	2035,95	2035,95
Kondisi Jalan	2035,95	2035,95	2035,95	2035,95	2035,95
Kelas Jalan	2035,95	2035,95	2035,95	2035,95	2035,95

Tahun	Rasio
1997	623,84
1998	623,84
1999	623,84
2000	623,84
2001	623,84
<i>rata-rata</i>	<b>623,84</b>



Panjang Trayek Angkutan Umum Total  
Tahun 1999 - 2001

Trayek	Tahun				
	1997	1998	1999	2000	2001
C	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80
E	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25
E1	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15
F	18,60	18,60	18,60	18,60	18,60
L	12,45	12,45	12,45	12,45	12,45
P1	21,60	21,60	21,60	21,60	21,60
P2	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10
P3	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
P4	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
P5	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
P6	29,20	29,20	29,20	29,20	29,20
P7	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
PE	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50
KAMAL	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
CAD	-	-	-	-	-
JND	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
PAC 1	22,45	22,45	22,45	22,45	22,45
PAC 2	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10
PAC 4	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
PAC 8	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
<b>Total</b>	<b>458,20</b>	<b>458,20</b>	<b>458,20</b>	<b>458,20</b>	<b>458,20</b>

rate-rata **458,20**

Luas wilayah Surabaya  
(+/-) 325,35 km

Tahun	Rasio
1997	140,40
1998	140,40
1999	140,40
2000	140,40
2001	140,40
2002	140,40
<b>rata-rata</b>	<b>140,40</b>

Volume sampah yang diangkut  
Perbulan Tahun 1997 - 2001

Tahun	Volume sampah yg diangkut/bln	Volume sampah yg diangkut/tahun
1997	251.040	8.258
1998	253.562	8.452
1999	250.500	8.350
2000	204.000	6.800
2001	201.000	6.700

Tahun	Rasio
1997	0,35
1998	0,35
1999	0,35
2000	0,28
2001	0,26
<i>rata-rata</i>	<b>0,32</b>

Tahun	Jumlah Penduduk
1997	2.355.465
1998	2.373.282
1999	2.405.946
2000	2.444.976
2001	2.566.352
<i>rata-rata</i>	<b>2.429.808</b>

Unsur Pelayanan Publik	Tahun					Rata-rata	(%)
	1997	1998	1999	2000	2001		
y1	9,46	10,03	10,67	11,21	11,41	10,56	-17,11
y2	0,9	0,10	0,11	0,11	0,11	0,27	708,16
y3	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11	0,12	10,73
y4	623,84	623,84	623,84	623,84	623,84	623,84	0,00
y5	140,40	140,40	140,40	140,40	140,40	140,40	0,00
y6	0,36	0,36	0,35	0,28	0,26	0,32	36,12
y7	0,006	0,064	0,003	0,001	0,001	0,01	477,82

**Dimana :**

y1 : rasio jumlah pengguna air bersih terhadap jumlah penduduk

y2 : rasio jumlah dokter ahli/spesialis terhadap jumlah penduduk

y3 : rasio jumlah sekolah terhadap jumlah penduduk

y4 : rasio panjang jalan terhadap luas wilayah

y5 : rasio panjang trayek angkutan umum total terhadap luas wilayah

y6 : rasio volume sampah yang diangkut per hari terhadap jumlah penduduk total

y7 : rasio saluran air kotor per jumlah penduduk



	tahun	rasio_y1	rasio_y2	rasio_y3	rasio_y4	rasio_y5	rasio_y6
1	9	9,46	,90	,12	623,84	140,40	,36
2	10	10,03	,10	,12	623,84	140,40	,36
3	11	10,67	,11	,12	623,84	140,40	,35
4	11	11,21	,11	,12	623,84	140,40	,28
5	11	11,41	,11	,11	623,84	140,40	,26



	rasio_y7	pdrb	apbd
1		15728548,66	301885646,23
2		12896236,24	362940108,00
3		13036491,09	461332016,23
4		13455465,85	532467123,43
5		13466061,25	631532751,03



		N	Correlation	Sig.
Pair 1	rasio jumlah pengguna air bersih terhadap jumlah penduduk & pdrb surabaya	5	-.596	.289
Pair 2	rasio jumlah dokter ahli/spesialis terhadap jumlah penduduk & pdrb surabaya	5	.978	.004
Pair 3	rasio jumlah sekolah terhadap jumlah penduduk & pdrb surabaya	5	.121	.846
Pair 4	rasio panjang jalan total terhadap luas wilayah & pdrb surabaya	5		
Pair 5	rasio panjang trayek angkutan umum total terhadap luas wilayah & pdrb surabaya	5		
Pair 6	rasio volume sampah diangkut perhari terhadap jumlah penduduk total & pdrb surabaya	5	.237	.701
Pair 7	rasio jumlah pengguna air bersih terhadap jumlah penduduk & apbd surabaya	5	.978	.004
Pair 8	rasio jumlah dokter ahli/spesialis terhadap jumlah penduduk & apbd surabaya	5	-.657	.228
Pair 9	rasio jumlah sekolah terhadap jumlah penduduk & apbd surabaya	5	-.738	.154
Pair 10	rasio panjang jalan total terhadap luas wilayah & apbd surabaya	5		
Pair 11	rasio panjang trayek angkutan umum total terhadap luas wilayah & apbd surabaya	5		
Pair 12	rasio volume sampah diangkut perhari terhadap jumlah penduduk total & apbd surabaya	5	-.922	.026

## T-Test

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	rasio jumlah pengguna air bersih terhadap jumlah penduduk	10.5560	5	.81362	.36386
	pdrb surabaya	13716560,62	5	1152653,7794	515482,44
Pair 2	rasio jumlah dokter ahli/spesialis terhadap jumlah penduduk	2660	5	.35444	.15851
	pdrb surabaya	13716560,62	5	1152653,7794	515482,44
Pair 3	rasio jumlah sekolah terhadap jumlah penduduk	1100	5	.00447	.00200
	pdrb surabaya	13716560,62	5	1152653,7794	515482,44
Pair 4	rasio panjang jalan total terhadap luas wilayah	623.8400	5	.00000	.00000
	pdrb surabaya	13716560,62	5	1152653,7794	515482,44
Pair 5	rasio panjang trayek angkutan umum total terhadap luas wilayah	140.4000	5	.00000	.00000
	pdrb surabaya	13716560,62	5	1152653,7794	515482,44
Pair 6	rasio volume sampah diangkut perhari terhadap jumlah penduduk total	.3220	5	.04817	.02154
	pdrb surabaya	13716560,62	5	1152653,7794	515482,44
Pair 7	rasio jumlah pengguna air bersih terhadap jumlah penduduk	10.5560	5	.81362	.36386
	apbd surabaya	458031529,0	5	131413602,83	58760950
Pair 8	rasio jumlah dokter ahli/spesialis terhadap jumlah penduduk	2660	5	.35444	.15851
	apbd surabaya	458031529,0	5	131413602,83	58760950
Pair 9	rasio jumlah sekolah terhadap jumlah penduduk	1100	5	.00447	.00200
	apbd surabaya	458031529,0	5	131413602,83	58760950
Pair 10	rasio panjang jalan total terhadap luas wilayah	623.8400	5	.00000	.00000
	apbd surabaya	458031529,0	5	131413602,83	58760950
Pair 11	rasio panjang trayek angkutan umum total terhadap luas wilayah	140.4000	5	.00000	.00000
	apbd surabaya	458031529,0	5	131413602,83	58760950
Pair 12	rasio volume sampah diangkut perhari terhadap jumlah penduduk total	.3220	5	.04817	.02154
	apbd surabaya	458031529,0	5	131413602,83	58760950

		Paired Differences		
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	rasio jumlah pengguna air bersih terhadap jumlah penduduk - pdrb surabaya	-13716550,0620	1152654,2643	515482,68
Pair 2	rasio jumlah dokter ahli/spesialis terhadap jumlah penduduk - pdrb surabaya	-13716560,3520	1152653,4329	515482,29
Pair 3	rasio jumlah sekolah terhadap jumlah penduduk - pdrb surabaya	-13716560,5000	1152653,7788	515482,44
Pair 4	rasio panjang jalan total terhadap luas wilayah - pdrb surabaya	-13715936,7700	1152653,7794	515482,44
Pair 5	rasio panjang trayek angkutan umum total terhadap luas wilayah - pdrb surabaya	-13716420,2100	1152653,7794	515482,44
Pair 6	rasio volume sampah diangkut perhari terhadap jumlah penduduk total - pdrb surabaya	-13716560,2600	1152653,7679	515482,44
Pair 7	rasio jumlah pengguna air bersih terhadap jumlah penduduk - apbd surabaya	-458031516,43	131413602,03	58769949
Pair 8	rasio jumlah dokter ahli/spesialis terhadap jumlah penduduk - apbd surabaya	-458031528,72	131413603,06	58769950
Pair 9	rasio jumlah sekolah terhadap jumlah penduduk - apbd surabaya	-458031528,87	131413602,83	58769950
Pair 10	rasio panjang jalan total terhadap luas wilayah - apbd surabaya	-458030905,14	131413602,83	58769950
Pair 11	rasio panjang trayek angkutan umum total terhadap luas wilayah - apbd surabaya	-458031388,58	131413602,83	58769950
Pair 12	rasio volume sampah diangkut perhari terhadap jumlah penduduk total - apbd surabaya	-458031528,66	131413602,87	58769950

		Paired Differences		t	df	Sig. (2-tailed)
		95% Confidence Interval of the Difference				
		Lower	Upper			
Pair 1	rasio jumlah pengguna air bersih terhadap jumlah penduduk - pdrb surabaya	-15147759,4	-12285340,8	-26,609	4	,000
Pair 2	rasio jumlah dokter ahli/spesialis terhadap jumlah penduduk - pdrb surabaya	-15147768,6	-12285352,1	-26,609	4	,000
Pair 3	rasio jumlah sekolah terhadap jumlah penduduk - pdrb surabaya	-15147769,2	-12285351,8	-26,609	4	,000
Pair 4	rasio panjang jalan total terhadap luas wilayah - pdrb surabaya	-15147145,5	-12284728,1	-26,608	4	,000
Pair 5	rasio panjang trayek angkutan umum total terhadap luas wilayah - pdrb surabaya	-15147628,9	-12285211,5	-26,609	4	,000
Pair 6	rasio volume sampah diangkat perhari terhadap jumlah penduduk total - pdrb surabaya	-15147769,0	-12285351,6	-26,609	4	,000
Pair 7	rasio jumlah pengguna air bersih terhadap jumlah penduduk - apbd surabaya	-621203057	-294859980	-7,794	4	,001
Pair 8	rasio jumlah dokter ahli/spesialis terhadap jumlah penduduk - apbd surabaya	-621203089	-294859989	-7,794	4	,001
Pair 9	rasio jumlah sekolah terhadap jumlah penduduk - apbd surabaya	-621203068	-294859989	-7,794	4	,001
Pair 10	rasio panjang jalan total terhadap luas wilayah - apbd surabaya	-621202445	-294859366	-7,794	4	,001
Pair 11	rasio panjang trayek angkutan umum total terhadap luas wilayah - apbd surabaya	-621202928	-294859849	-7,794	4	,001
Pair 12	rasio volume sampah diangkat perhari terhadap jumlah penduduk total - apbd surabaya	-621203068	-294859989	-7,794	4	,001

-Test

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
rasio jumlah pengguna air bersih terhadap jumlah penduduk pdrb surabaya	5	10,5560	,81362	,36386
rasio jumlah pengguna air bersih terhadap jumlah penduduk apbd surabaya	5	13716581	1152653,7794	515482,44

One-Sample Test

	Test Value = 4					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
rasio jumlah pengguna air bersih terhadap jumlah penduduk pdrb surabaya	18.018	4	.000	6.5560	5.5458	7.5662
	26.609	4	.000	13716556.6	12285348	15147765

-Test

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
rasio jumlah pengguna air bersih terhadap jumlah penduduk pdrb surabaya	5	10.5560	.81362	.36386
	5	4.58E+08	131413602.83	58769950

One-Sample Test

	Test Value = 4					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
rasio jumlah pengguna air bersih terhadap jumlah penduduk pdrb surabaya	18.018	4	.000	6.5560	5.5458	7.5662
	7.794	4	.001	458031525	2.95E+08	6.21E+08